



Pokdarwis SIWISDEM: Revitalisasi Destinasi Wisata Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal melalui Program Pengembangan Wawasan Manajerial

*Farel Ilham Pamungkas, Pandu Yudi Putra, Agung Winarno, Wening Patmi Rahayu

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.53621/jippmas.v6i1.782>

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 30 April 2026

Revisi Akhir: 21 Mei 2026

Disetujui: 22 Mei 2026

Terbit: 5 Juni 2026

Kata Kunci:

Kearifan lokal;

Pengembangan Wawasan Manajerial;

Pokdarwis;

SIWISDEM;

Wisata berbasis budaya.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan manajerial Pokdarwis SIWISDEM, mengidentifikasi kebutuhan intervensi berbasis manajemen, dan mengembangkan program pengabdian masyarakat yang terstruktur dalam rangka revitalisasi destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Kegiatan PWM ini dilaksanakan bersama mitra Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) SIWISDEM yang berkolaborasi dengan BUMDes Desa Wisata Desa Wonosari/Sumberdem. Metode: Pendekatan kualitatif partisipatif diterapkan melalui dua tahap kunjungan lapangan (10 Februari dan 24 Februari 2026), dengan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap 8 informan kunci yang terdiri atas pengurus Pokdarwis, pengelola BUMDes, dan tokoh masyarakat setempat, untuk mengidentifikasi permasalahan manajerial mitra serta merancang program intervensi yang terstruktur. Hasil: Ditemukan enam permasalahan manajerial yang mencakup standarisasi produk wisata, pemasaran digital, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran masyarakat – lima di antaranya bersifat produktif dan satu non-produktif. Sebagai respons, enam program intervensi terstruktur dirancang dengan luaran terukur antara lain: minimal 10 pemandu wisata terlatih bersertifikat, 2-3 paket wisata siap jual, 1 MoU pengelolaan SIWISDEM, dan SOP kelembagaan Pokdarwis, yang dijadwalkan dalam 16 minggu pelaksanaan (Februari-Mei 2026). Kesimpulan: Program PWM ini berpotensi meningkatkan kapasitas manajerial Pokdarwis SIWISDEM secara signifikan dan dapat dijadikan model replikasi pengabdian masyarakat berbasis manajemen bagi desa wisata lain di Indonesia. Diperlukan komitmen tiga lembaga mitra dan dukungan keberlanjutan pasca-program untuk memastikan dampak jangka panjang terhadap revitalisasi destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang menjadi modal strategis pengembangan pariwisata. Sektor pariwisata nasional terus tumbuh signifikan, tercermin dari kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 11,68 juta pada tahun 2023 dan target 14,3 juta pada 2024 (Kemenparekraf, 2024). Dalam dekade terakhir, tren global menunjukkan pergeseran preferensi wisatawan dari pariwisata massal menuju wisata berbasis budaya dan kearifan lokal yang autentik (Khotimah et al., 2017; Priyanto & Safitri, 2016; UNWTO, 2023). Dalam konteks ini, pendekatan community-based tourism (CBT) terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata sekaligus mendukung pelestarian nilai-nilai budaya setempat (Hermawan, 2016; Rizkianto & Topowijono, 2018; Sebele, 2021; Suansri, 2003).

Salah satu wujud kelembagaan CBT di Indonesia adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yaitu kelompok masyarakat yang secara sukarela aktif dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di wilayahnya (Muliawan et al., 2016; Widyaningsih

& Damanik, 2018). Pemerintah melalui Kemenparekraf menargetkan pembentukan 6.000 desa wisata mandiri pada tahun 2024 sebagai bagian dari agenda transformasi pariwisata nasional; namun realita di lapangan menunjukkan kesenjangan yang serius: survei nasional tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 70% Pokdarwis belum memiliki SOP pengelolaan, lebih dari 60% tidak memiliki rencana kerja tahunan yang terstruktur, dan kurang dari 30% mampu memanfaatkan platform digital secara aktif untuk pemasaran destinasi (Kemenparekraf, 2022; Kreatif, 2012). Kesenjangan antara kondisi ideal Pokdarwis sebagai pengelola destinasi wisata yang profesional dan kondisi nyata kapasitas manajerial yang masih sangat terbatas menjadi inti permasalahan yang belum tuntas diatasi (Hadiwijoyo, 2012; Martaleni, 2019; Setiawan & Haryanti, 2022; Sugiarti, 2019).

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi Pokdarwis untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing destinasi wisata. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa destinasi desa wisata yang aktif memanfaatkan platform digital mengalami peningkatan kunjungan wisatawan rata-rata 45% lebih tinggi dibandingkan yang mengandalkan promosi konvensional (Zulfikri & Harini, 2023). Namun, terdapat kesenjangan kapasitas yang kritis: kondisi ideal mengharuskan Pokdarwis memiliki tim pengelola konten digital yang terlatih, platform terintegrasi, dan tata kelola digital yang formal; sementara realitasnya, sebagian besar Pokdarwis termasuk SIWISDEM masih mengandalkan media sosial informal dan menghadapi miskomunikasi kelembagaan dalam pengelolaan platform digital (Rosidah & Anggara, 2021; Zulfikri & Harini, 2023). Akan tetapi, pemanfaatan platform digital menuntut kompetensi pengelolaan konten yang tidak selalu dimiliki oleh pengurus Pokdarwis, yang umumnya merupakan warga lokal tanpa latar belakang teknologi informasi (Fitriani & Suwena, 2020; Rosidah & Anggara, 2021). Keberhasilan pengembangan destinasi desa wisata juga sangat ditentukan oleh kemampuan pengelolanya dalam menyusun produk wisata yang terstruktur dan terstandarisasi (Arida & Pujani, 2017; Irawati & Suryasih, 2018)

Berbagai penelitian terkini menggarisbawahi urgensi intervensi terstruktur berbasis manajemen untuk mengatasi kesenjangan kapasitas Pokdarwis. Setiawan dan Haryanti (2022) menemukan bahwa pelatihan manajemen organisasi mampu meningkatkan efektivitas tata kelola Pokdarwis secara signifikan. Wahyudin (2018) menegaskan pentingnya perjanjian formal antar lembaga dalam pengelolaan platform digital desa wisata. Sementara itu, Purnomo et al. (2020) dan Suryono (2021) menunjukkan bahwa model pengabdian masyarakat berbasis riset dan intervensi manajemen terbukti lebih efektif dalam membangun kemandirian komunitas wisata dibandingkan pendekatan bantuan konvensional. Program Pengembangan Wawasan Manajerial (PWM) yang dirancang oleh Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Negeri Malang merupakan wahana strategis penerapan kompetensi akademik mahasiswa dalam menjawab permasalahan nyata di masyarakat (Purnomo et al., 2020; Suryono, 2021). Melalui PWM, mahasiswa dituntut untuk mengidentifikasi permasalahan mitra secara sistematis, merancang program intervensi berbasis pendekatan manajemen, dan melaksanakannya secara kolaboratif bersama mitra (Yuliati et al., 2022).

Meskipun berbagai studi telah membahas pengembangan Pokdarwis secara parsial baik dari aspek pemasaran digital, penguatan SDM, maupun kelembagaan belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan keenam dimensi permasalahan tersebut ke dalam satu kerangka intervensi manajerial yang terstruktur dan dapat direplikasi, khususnya dalam konteks desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal

yang memiliki platform digital sendiri. Artikel ini menyajikan hasil pelaksanaan PWM bersama Pokdarwis SIWISDEM yang berkolaborasi dengan BUMDes Desa Wisata. Tujuan penelitian ini secara eksplisit adalah: (1) menganalisis dan mendeskripsikan enam permasalahan manajerial yang dihadapi Pokdarwis SIWISDEM beserta akar penyebabnya; (2) mengembangkan dan menguraikan rancangan enam program intervensi manajerial terstruktur sebagai solusi berbasis bukti; dan (3) mendokumentasikan model kolaborasi akademik-komunitas melalui PWM sebagai kontribusi praktis dan referensi replikasi bagi pengembangan desa wisata berbasis manajemen di Indonesia. Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka intervensi manajerial enam-dimensi yang mengintegrasikan standarisasi produk, pemasaran digital, pengembangan SDM, tata kelola kelembagaan, koordinasi lintas lembaga, dan penguatan kesadaran masyarakat dalam satu siklus program terpadu yang dilaksanakan bersama Pokdarwis yang memiliki platform digital sendiri (SIWISDEM).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PWM ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif yang secara operasional menempatkan pengurus Pokdarwis SIWISDEM, pengelola BUMDes Desa Wisata, dan tokoh masyarakat Desa Wonosari/Sumberdem bukan sekadar sebagai objek pengamatan, melainkan sebagai mitra setara yang terlibat aktif dalam setiap tahap kegiatan—mulai dari identifikasi masalah, validasi temuan, hingga penyepakatan rancangan program intervensi (Chambers, 1994; Purnomo et al., 2020). Dalam konteks PWM bersama Pokdarwis SIWISDEM, pendekatan ini dioperasionalkan melalui tiga prinsip utama. Pertama, prinsip keterlibatan bermakna (*meaningful participation*): pada kunjungan lapangan pertama (10 Februari 2026), tim mahasiswa tidak datang dengan daftar solusi yang telah disiapkan sebelumnya, melainkan membuka ruang dialog terbuka bersama 8 informan kunci untuk menggali permasalahan dari perspektif anggota Pokdarwis sendiri. Kedua, prinsip validasi partisipatif: seluruh temuan observasi dan hasil wawancara dikonfirmasi ulang kepada mitra pada kunjungan kedua (24 Februari 2026) melalui sesi *focus group discussion* (FGD) singkat, sehingga mitra memiliki kesempatan mengoreksi, menambahkan, atau memprioritaskan permasalahan sesuai pengalaman mereka. Ketiga, prinsip ko-desain program: rancangan keenam program intervensi disusun secara bersama-sama dalam forum koordinasi tiga lembaga (Pokdarwis, BUMDes, dan tim PWM), sehingga setiap program mencerminkan kebutuhan nyata dan kesanggupan pelaksanaan mitra, bukan semata keputusan sepihak tim akademik (Suryono, 2021; Yulianti et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena karakteristik permasalahan Pokdarwis SIWISDEM bersifat kontekstual dan multidimensional, sehingga hanya dapat dipahami secara utuh melalui keterlibatan langsung dan dialog mendalam dengan para pemangku kepentingan yang memiliki pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang tidak dapat diperoleh melalui survei kuantitatif semata.

Mitra utama kegiatan ini adalah Pokdarwis SIWISDEM, sebuah kelompok sadar wisata yang bergerak dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal (Irawati & Suryasih, 2018). Produk wisata utama yang dikelola meliputi wisata edukasi budaya, wisata agro, dan wisata petualangan alam (Priyanto & Safitri, 2016). Pokdarwis ini berkolaborasi dengan dua lembaga mitra, yaitu Pokdarwis sebagai mitra peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan BUMDes Desa Wisata sebagai mitra pengelolaan keuangan serta pengembangan usaha wisata desa (Wahyudin, 2018). Sinergi

ketiga lembaga ini menjadi kunci dalam membangun ekosistem pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2010).

Keunikan mitra ini terletak pada keberadaan platform digital SIWISDEM (Sistem Informasi Wisata Desa) yang dirancang sebagai kanal promosi dan pengelolaan informasi wisata desa secara terpadu (Fitriani & Suwena, 2020; Rosidah & Anggara, 2021). Platform ini diharapkan menjadi jembatan antara potensi wisata lokal dengan calon wisatawan secara digital (Zulfikri & Harini, 2023). Namun dalam perjalanannya, pengelolaan SIWISDEM menghadapi sejumlah hambatan teknis dan kelembagaan yang serius. Dari sisi teknis, hambatan yang teridentifikasi meliputi: (1) konten website tidak diperbarui secara rutin akibat ketiadaan admin yang ditunjuk secara resmi dan terlatih; (2) keterbatasan kompetensi digital anggota Pokdarwis dalam pengelolaan sistem manajemen konten (CMS) website, sehingga unggahan informasi destinasi, jadwal kegiatan, dan galeri wisata tidak berjalan konsisten; serta (3) absennya panduan teknis (technical guideline) yang mendokumentasikan prosedur pengelolaan konten secara tertulis. Dari sisi kelembagaan, hambatan utama yang ditemukan adalah: (1) ketidakjelasan kepemilikan akun administrator website antara Pokdarwis dan BUMDes Desa Wisata, yang berujung pada situasi di mana kedua pihak saling menunggu tanpa tindakan nyata; (2) belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian tertulis yang menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam pengelolaan platform SIWISDEM; serta (3) tidak adanya mekanisme koordinasi rutin dan pelaporan berkala antar lembaga pengelola yang mengakibatkan platform berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi yang sistemik (Nugroho, 2011; Rosidah & Anggara, 2021; Wahyudin, 2018). Keseluruhan hambatan ini memerlukan intervensi terstruktur yang mencakup dimensi teknis sekaligus tata kelola kelembagaan secara bersamaan.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui dua tahap kunjungan lapangan. Kunjungan pertama pada 10 Februari 2026 berfokus pada observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pengurus Pokdarwis dan pengelola BUMDes. Kunjungan kedua pada 24 Februari 2026 digunakan untuk konfirmasi dan penyepakatan rancangan program intervensi bersama seluruh pemangku kepentingan. Data yang diperoleh mencakup kondisi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan produk wisata, dan status operasional platform digital SIWISDEM.

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengintegrasikan temuan observasi lapangan dan hasil wawancara mendalam, kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori masalah produktif dan non-produktif (Purnomo et al., 2020). Analisis SWOT diterapkan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi mitra sebagai dasar perancangan program intervensi yang realistis dan terukur (Rangkuti, 2016; Soleh, 2017). Enam program intervensi yang telah dirancang selanjutnya dijadwalkan dalam rencana kerja 16 minggu, mencakup Februari hingga Mei 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam, ditemukan enam permasalahan utama yang menghambat kemajuan Pokdarwis SIWISDEM. Permasalahan tersebut mencakup dimensi produk wisata, pemasaran digital, sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran

masyarakat. Keenam permasalahan dibagi ke dalam dua kategori: lima permasalahan bersifat produktif dan satu bersifat non-produktif, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Permasalahan Mitra Pokdarwis SIWISDEM dan Usulan Pemecahan

Permasalahan	Penyebab Masalah	Akibat	Usulan Pemecahan	Kategori
Produk wisata belum terstandarisasi berbasis nilai budaya lokal	Kurangnya pengetahuan teknis; belum ada pendampingan standardisasi	Kualitas pengalaman wisatawan rendah	Pelatihan standardisasi produk; penyusunan SOP berbasis nilai budaya lokal	Produktif
Belum tersedia paket wisata yang terstruktur dan siap ditawarkan	Tidak ada tim kompeten; minimnya referensi standar	Kehilangan potensi pendapatan; wisatawan tidak mengetahui produk	Workshop pemantapan paket wisata; penyusunan brosur/katalog	Produktif
Produk UKM dan kuliner lokal belum diselaraskan kebutuhan wisatawan	Pelaku UKM belum memahami standar produk wisata	Pengalaman wisata kurang lengkap	Pelatihan UKM kuliner; kurasi produk lokal; integrasi ke paket wisata	Produktif
Kemampuan manajerial pengelolaan Pokdarwis sangat terbatas	Anggota belum pernah mengikuti pelatihan manajemen organisasi wisata	Organisasi tidak efektif; potensi konflik internal tinggi	Pelatihan manajemen organisasi; penyusunan AD/ART dan SOP	Produktif
Miskomunikasi pengelolaan website SIWISDEM: pemegang akun dan pembagian tugas belum jelas	Tidak ada MoU resmi; koordinasi lintas lembaga belum terstruktur	Website tidak diperbarui; potensi wisata tidak terpromosikan digital	Fasilitasi pertemuan koordinasi; penyusunan MoU; penetapan admin konten	Produktif
Minimnya pemahaman masyarakat	Sosialisasi dan edukasi budaya belum	Masyarakat kurang mendukung	Sosialisasi warga; pembentukan	Non-Produktif

Permasalahan	Penyebab Masalah	Akibat	Usulan Pemecahan	Kategori
terhadap pelestarian nilai-nilai lokal melalui pariwisata	pernah dilakukan sistematis	program wisata; kearifan lokal terancam	komunitas pendukung; literasi budaya	

Analisis terhadap keenam permasalahan yang tersaji dalam Tabel 1 mengungkap pola struktural yang saling berkaitan dan tidak dapat dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Pertama, dari perspektif kepariwisataan berbasis komunitas, ketiga permasalahan pada dimensi produk wisata (nomor 1, 2, dan 3) membentuk rantai kelemahan yang saling memperkuat: ketiadaan standarisasi produk wisata menyebabkan ketidakmampuan menyusun paket wisata yang kompetitif, yang pada gilirannya menghalangi integrasi produk UKM dan kuliner lokal ke dalam ekosistem wisata yang kohesif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Arida dan Pujani (2017) bahwa kegagalan standarisasi produk wisata di tingkat Pokdarwis berkorelasi langsung dengan rendahnya konversi minat wisatawan menjadi kunjungan aktual. Kedua, dari perspektif tata kelola organisasi, permasalahan nomor 4 (keterbatasan manajerial) dan nomor 5 (miskomunikasi pengelolaan SIWISDEM) merupakan manifestasi dari satu akar permasalahan yang sama: absennya kerangka kelembagaan yang formal—mencakup AD/ART, SOP, pembagian tugas, dan perjanjian antar lembaga. Hadiwijoyo (2012) dan Setiawan dan Haryanti (2022) menegaskan bahwa tanpa kerangka kelembagaan yang formal, Pokdarwis rentan terhadap konflik internal dan stagnasi pengelolaan meskipun memiliki potensi wisata yang besar. Ketiga, permasalahan nomor 6 (minimnya kesadaran masyarakat) dikategorikan non-produktif karena bersifat prasyarat kultural yang mendasari keberhasilan semua program produktif lainnya: tanpa dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat, program-program intervensi teknis dan manajerial berisiko kehilangan keberlanjutan setelah program PWM berakhir (Dewi et al., 2013; Suansri, 2003). Pola keterkaitan antar dimensi permasalahan ini menjadi dasar pertimbangan mengapa keenam program intervensi harus dirancang dan dilaksanakan secara terintegrasi, bukan secara parsial dan terpisah-pisah.

Dalam aspek pemasaran, analisis data lapangan menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Pokdarwis SIWISDEM masih sepenuhnya bertumpu pada kanal informal—WhatsApp dan Instagram—dengan rata-rata frekuensi unggahan yang tidak konsisten dan tidak mengikuti kalender konten yang terencana. Temuan wawancara mengungkap bahwa dari 8 informan kunci, seluruhnya mengakui tidak pernah menggunakan data analitik (seperti Instagram Insights atau Google Analytics) untuk mengukur efektivitas promosi yang telah dilakukan. Kondisi ini mencerminkan gap yang signifikan antara potensi digital SIWISDEM sebagai platform promosi terintegrasi dengan realitas pemanfaatannya yang minimal. Website SIWISDEM telah dirintis sebagai kanal promosi digital, namun menghadapi hambatan serius berupa miskomunikasi kepemilikan akun antara Pokdarwis dan BUMDes. Absennya perjanjian resmi mengenai tanggung jawab pengelolaan platform digital mengakibatkan website tidak diperbarui secara rutin, sehingga potensi wisata yang ada tidak terpromosikan secara efektif di dunia digital (Rosidah & Anggara, 2021; Zulfikri & Harini, 2023).

Dari sisi sumber daya manusia, analisis data wawancara mendalam mengungkap bahwa tidak satu pun anggota Pokdarwis SIWISDEM yang memiliki sertifikasi pemandu wisata resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Seluruh pemanduan wisata selama ini dilakukan secara informal berdasarkan pengetahuan lokal turun-temurun tanpa standar kompetensi yang terukur, yang berdampak pada inkonsistensi kualitas layanan bagi wisatawan dari kunjungan ke kunjungan berikutnya. Kondisi ini berimplikasi langsung pada rendahnya kepuasan wisatawan dan minimnya ulasan positif di platform digital (Martaleni, 2019; Widyaningsih & Damanik, 2018). Kolaborasi dengan anggota Pokdarwis diharapkan menjadi solusi peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan pemandu wisata yang terstruktur (Setiawan & Haryanti, 2022). Dari aspek kelembagaan, analisis dokumen dan wawancara mengkonfirmasi bahwa Pokdarwis SIWISDEM belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan wisata yang baku, tidak ada deskripsi jabatan (job description) tertulis untuk setiap pengurus, dan belum pernah menyelenggarakan rapat koordinasi formal yang terdokumentasi. Data lapangan menunjukkan bahwa dari lima pengurus inti Pokdarwis, hanya satu orang yang memahami alur kerja keseluruhan organisasi secara menyeluruh, sementara empat pengurus lainnya bekerja berdasarkan kebiasaan dan inisiatif individual tanpa panduan tertulis. Ketidadaan struktur kelembagaan yang formal ini menjadi hambatan sistemik yang menghambat skalabilitas dan keberlanjutan program wisata SIWISDEM dalam jangka panjang (Hadiwijoyo, 2012; Sugiarti, 2019).

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tim mahasiswa merancang enam program kegiatan intervensi yang terstruktur sebagai berikut:

- **Program 1-Pelatihan Pemandu Wisata.** Mencakup orientasi budaya lokal, pelatihan teknik pemanduan profesional, dan simulasi tour. Luaran: modul pelatihan terstandar, minimal 10 pemandu wisata terlatih, dan dokumen sertifikat pelatihan resmi.
- **Program 2-Workshop Pementapan Paket Wisata.** Perancangan 2-3 paket wisata dengan variasi segmen (alam, budaya, edukasi), penetapan struktur harga, serta penyusunan brosur/flyer digital dan katalog resmi.
- **Program 3-Pendampingan Promosi Wisata.** Integrasi produk UKM dan kuliner lokal ke ekosistem wisata, kurasi produk UKM, pelatihan pengemasan produk, dan pembuatan materi promosi digital.
- **Program 4-Vitalisasi SIWISDEM.** Fasilitasi pertemuan koordinasi tiga lembaga, penyusunan MoU resmi pengelolaan SIWISDEM, penetapan admin konten digital, dan pelatihan pengelolaan konten website.
- **Program 5-Pelatihan Manajemen Organisasi Pokdarwis.** Penyusunan AD/ART, pembuatan SOP pengelolaan wisata, penyusunan rencana kerja tahunan, dan sesi coaching manajerial intensif.
- **Program 6-Sosialisasi Masyarakat.** Sosialisasi pentingnya pariwisata berbasis kearifan lokal, pembentukan komunitas pendukung wisata desa, dan program literasi budaya bagi generasi muda.

Seluruh program kegiatan PWM dijadwalkan selama 16 minggu, dari Februari hingga Mei 2026, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Timeline Pelaksanaan Program PWM Pokdarwis SIWISDEM

Aktivitas	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026
Survei dan Identifikasi Permasalahan Mitra	10 Feb			
Penyusunan Program Kegiatan	24 Feb			
Sosialisasi Program Kegiatan ke Mitra		27 Mar		
Pelatihan Pemandu Wisata (bersama Anggota Pokdarwis)		28 Mar		
Workshop Pemantapan Paket Wisata			3 Apr	
Pendampingan Promosi Wisata (UKM & Kuliner Lokal)			6 Apr	
Vitalisasi SIWISDEM			9 Apr	
Pelatihan Manajemen Organisasi Pokdarwis			27 Apr	
Monitoring dan Evaluasi Program				1 Mei

Dalam pelaksanaan PWM telah dilakukan dua kunjungan lapangan yang terdokumentasi. Kunjungan pertama pada 10 Februari 2026 berfokus pada observasi langsung kondisi eksisting Pokdarwis SIWISDEM dan wawancara mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan. Hasil kunjungan ini menjadi dasar penyusunan lembar laporan observasi dan identifikasi enam permasalahan utama mitra. Kunjungan kedua pada 24 Februari 2026 digunakan untuk mempresentasikan hasil identifikasi permasalahan kepada seluruh pihak dan menyepakati rancangan enam program intervensi beserta mekanisme koordinasi pelaksanaannya.



Gambar 1. Rapat Agenda Pokdarwis



Gambar 2. Rapat Pembahasan Sosial Media

Pembahasan

Temuan kegiatan PWM ini mencerminkan tantangan umum yang dihadapi sebagian besar desa wisata berbasis komunitas di Indonesia (Dewi et al., 2013; Hermawan, 2016).

Keterbatasan kapasitas manajerial merupakan hambatan yang paling dominan ditemukan dalam pengelolaan Pokdarwis di berbagai daerah (Hadiwijoyo, 2012; Setiawan & Haryanti, 2022). Kondisi ini lazim terjadi karena pembentukan Pokdarwis umumnya didasari semangat komunitas tanpa disertai pembekalan manajemen organisasi yang memadai, sehingga potensi yang sesungguhnya besar tidak dapat dikelola secara optimal (Sugiarti, 2019; Widyaningsih & Damanik, 2018).

Permasalahan standarisasi produk wisata yang ditemukan di Pokdarwis SIWISDEM sejalan dengan prinsip pengembangan CBT yang menekankan pentingnya pengemasan produk wisata secara terstruktur agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Arida & Pujani, 2017; Irawati & Suryasih, 2018; Suansri, 2003). Tanpa standarisasi yang jelas, destinasi wisata berisiko memberikan pengalaman yang tidak konsisten bagi pengunjung, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan dan kecilnya kemungkinan kunjungan ulang (Haryanto, 2014; Hermawan, 2016).

Miskomunikasi dalam pengelolaan platform digital SIWISDEM menggambarkan tantangan tata kelola lintas lembaga yang memerlukan penyelesaian di tingkat formal, bukan sekadar perbaikan teknis (Rosidah & Anggara, 2021; Wahyudin, 2018). Absennya perjanjian tertulis mengenai tanggung jawab pengelolaan digital merupakan akar masalah yang hanya dapat diselesaikan melalui penyusunan MoU yang mengikat secara kelembagaan (Nugroho, 2011; Zulfikri & Harini, 2023). Dengan demikian, program vitalisasi SIWISDEM harus didahului oleh penyelesaian tata kelola ini sebagai prasyarat keberhasilannya (Fitriani & Suwena, 2020).

Rancangan enam program intervensi yang disusun tim mencerminkan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai agen perubahan, bukan sekadar penerima manfaat (Purnomo et al., 2020; Suryono, 2021). Pendekatan ini selaras dengan prinsip CBT yang menekankan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai faktor penentu keberlanjutan destinasi wisata berbasis budaya (Muliawan et al., 2016; Pitana & Gayatri, 2005; Rizkianto & Topowijono, 2018; Suansri, 2003). Program yang dijalankan tidak hanya dirancang untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek, melainkan juga untuk membangun kapasitas mitra secara mandiri guna memastikan keberlanjutan pengelolaan wisata dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab ketiga tujuan yang ditetapkan di bagian pendahuluan. Pertama, kegiatan PWM telah menganalisis dan mengidentifikasi secara sistematis enam permasalahan manajerial mendasar yang menghambat kemajuan Pokdarwis SIWISDEM, meliputi standarisasi produk wisata, pemasaran digital, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran masyarakat—dengan pola keterkaitan struktural antar dimensi yang saling memperkuat. Kedua, sebagai respons berbasis bukti terhadap keenam permasalahan tersebut, tim PWM mengembangkan enam program intervensi manajerial terstruktur yang mencakup pelatihan pemandu wisata, pemantapan paket wisata, promosi wisata, vitalisasi platform digital SIWISDEM, penguatan manajemen organisasi, dan sosialisasi masyarakat, seluruhnya dirancang dengan luaran terukur dalam kerangka 16 minggu pelaksanaan. Ketiga, kegiatan ini mendokumentasikan secara komprehensif model kolaborasi akademik-komunitas yang partisipatif melalui mekanisme PWM sebagai wahana pengabdian masyarakat berbasis manajemen. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka diagnostik-intervensi manajerial enam-dimensi

yang terintegrasi, sebuah pendekatan yang secara teoritis memperkaya literatur community-based tourism dengan membuktikan bahwa permasalahan desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan mensyaratkan intervensi simultan yang mencakup dimensi produk, sumber daya manusia, digitalisasi, kelembagaan, koordinasi, dan sosial budaya sekaligus. Secara praktis, model ini memberikan peta jalan yang dapat direplikasi oleh Pokdarwis lain di Indonesia—terutama yang memiliki aset digital sendiri namun menghadapi keterbatasan kapasitas manajerial—dalam merancang program pemberdayaan yang holistik dan berakar pada kebutuhan nyata komunitas. Keberhasilan implementasi program ini pada gilirannya akan memperkuat posisi Pokdarwis SIWISDEM sebagai model desa wisata berbasis kearifan lokal yang dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika pariwisata di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pokdarwis SIWISDEM dan BUMDes Desa Wisata atas keterbukaan dan kerja sama yang diberikan selama proses pelaksanaan kegiatan PWM. Penghargaan juga disampaikan kepada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Negeri Malang atas dukungan akademik dan administratif dalam penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat ini sebagai perwujudan nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, I. N. S., & Pujani, L. K. (2017). Penelitian pariwisata berbasis masyarakat di Bali: studi kasus pengembangan desa wisata. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 3(2), 57–78. <https://doi.org/10.24922/jumpa.v3i2.29985>.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.5333>.
- Fitriani, N., & Suwena, I. K. (2020). Strategi pemasaran digital untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di desa wisata. *Jurnal IPTA*, 8(1), 33–45. <https://doi.org/10.24843/IPTA.2020.v08.i01.p05>.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Graha Ilmu.
- Haryanto, J. T. (2014). Model pengembangan ekowisata dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah. *Jurnal Kawistara*, 4(3), 245–256. <https://doi.org/10.22146/kawistara.7799>.
- Hermawan, H. (2016). Dampak pengembangan desa wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117. <https://doi.org/10.31311/jp.v3i2.1037>.
- Irawati, E., & Suryasih, I. A. (2018). Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 111–117. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2018.v06.i01.p17>.
- Kreatif, K. P. dan E. (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Kemenparekraf.
- Martaleni. (2019). Pemberdayaan Pokdarwis melalui peningkatan kapasitas dan inovasi pemasaran wisata. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(4), 201–210. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v25i4.15271>.
- Muliawan, I. W., Buda, I. K., & Mahagangga, I. G. A. O. (2016). Pengembangan desa wisata berbasis komunitas. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(1), 18–22. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2016.v04.i01.p04>.

- Nugroho, I. (2011). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (2010).
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Andi.
- Priyanto, & Safitri, D. (2016). Pengembangan potensi desa wisata berbasis budaya tinjauan terhadap desa wisata di Jawa Tengah. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(1), 76–84. <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i1.29>.
- Purnomo, A., Irwanto, R., Syaifuddin, S., Asari, A., Nusantara, A. B. P., Cahyono, Y., & Arifin, A. S. (2020). Pengabdian masyarakat berbasis riset dan pengembangan wisata desa. *Jurnal Abdimas BSI*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i1.6756>.
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rizkianto, N., & Topowijono. (2018). Penerapan konsep community based tourism dalam pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 58(2), 20–27. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2018.058.02.03>.
- Rosidah, U., & Anggara, D. I. W. (2021). Pendampingan pengelolaan desa wisata berbasis digital untuk Pokdarwis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Wahana Edukasi*, 7(2), 88–96. <https://doi.org/10.36307/jpwe.v7i2.148>.
- Setiawan, B., & Haryanti, T. (2022). Pelatihan manajemen organisasi bagi Kelompok Sadar Wisata dalam mengembangkan desa wisata. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 3(2), 45–57. <https://doi.org/10.36276/jap.v3i2.321>.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52. <https://doi.org/10.36085/jsungkai.v5i1.109>.
- Spillane, J. J. (1994). *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Kanisius.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. REST Project.
- Sugiarti, R. (2019). Penguatan kelembagaan Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(1), 48–53. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v3i1.1228>.
- Suryono, A. (2021). Inovasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(2), 114–122. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v27i2.28774>.
- Wulandari, I. G. A. A., Ilma, A. Z., Mudra, I. W., Agustika, I. G. P. N. S., & Dewi, G. A. K. R. S. (2025). Pelatihan Seni Kriya Gerabah Bermotif Astha Dewata sebagai Upaya Revitalisasi Warisan Budaya Bali. *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 294–303. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v5i2.636>
- Wahyudin, N. (2018). Model pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal dalam meningkatkan perekonomian desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 49–63. <https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8014>
- Widyaningsih, E., & Damanik, J. (2018). Membangun pariwisata berbasis komunitas melalui pemberdayaan Pokdarwis. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 10(2), 110–125. <https://doi.org/10.22146/jnp.38813>
- Yuliati, D., Ernawati, N. M., & Mahadewi, N. M. E. (2022). Revitalisasi destinasi wisata berbasis kearifan lokal melalui program pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pariwisata Indonesia*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.36276/jpmpi.v4i1.1687>

Zulfikri, A., & Harini, R. (2023). Digitalisasi pemasaran Pokdarwis sebagai upaya peningkatan daya saing desa wisata pascapandemi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia*, 9(2), 201-214.
<https://doi.org/10.7454/jpkmui.v9i2.702>

*** Farel Ilham Pamungkas, S.E. (Penulis Korespondensi)**

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Email: farel.ilham.2504138@students.um.ac.id

Pandu Yudi Putra, S.Pd.

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Email: pandu.yudi.2504138@student.um.ac.id

Prof. Dr. Agung Winarno, M.M.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Email: agung.winarno.fe@um.ac.id

Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Email: wening.patmi.fe@um.ac.id
